

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-10/BC/BC.11/2025
TENTANG
KERTAS KERJA RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029, perlu menyusun Kertas Kerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Kertas Kerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);

4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG KERTAS KERJA RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Kertas Kerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Kertas Kerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi program-program bersifat indikatif yang akan dijalankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Kertas Kerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan Unit Eselon II dengan terlebih dahulu disampaikan kepada direktorat yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan perencanaan strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk penelaahan usulan perubahan Kertas Kerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR PENERIMAAN DAN
PERENCANAAN STRATEGIS,



Ditandatangani secara elektronik
MOHAMMAD AFLAH FAROBI



KERTAS KERJA RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2025-2029

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
1. Tujuan Kebijakan Fiskal yang Proaktif, Adaptif dan Mampu Menggerakkan Transformasi Ekonomi									
1.1 Arah Kebijakan Diplomasi Ekonomi Internasional									
1.1.1	Meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan kerja sama kepabeanan internasional	1.1.1.1	Penguatan fungsi dan perluasan wilayah Atase Keuangan						Dit. KSIKC
		1.1.1.2	Peran aktif dalam forum WTO terkait <i>Moratorium on Customs Duties Electronic Transmission (CDET)</i>						Dit. KSIKC
		1.1.1.3	Peran aktif dalam rangkaian pertemuan APEC SCCP serta fora APEC terkait lainnya						Dit. KSIKC
		1.1.1.4	Penguatan posisi dalam perundingan Kepabeanan dan Cukai dalam lingkup Bilateral						Dit. KSIKC
		1.1.1.5	Penguatan posisi dalam perundingan Kepabeanan dan Cukai dalam lingkup Regional						Dit. KSIKC
		1.1.1.6	Penguatan posisi dalam perundingan Kepabeanan dan Cukai dalam lingkup Sub Regional						Dit. KSIKC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		1.1.1.7	Penguatan posisi dalam perundingan Kepabeanan dan Cukai dalam lingkup Multilateral						Dit. KSIKC
		1.1.1.8	Keanggotaan DJBC dalam WCO <i>Policy Commission</i> 2024-2026						Dit. KSIKC
		1.1.1.9	Keberhasilan <i>Chairmanship</i> oleh DJBC dalam forum kerja sama internasional						Dit. KSIKC
		1.1.1.10	Pencapaian kesepakatan dalam perundingan kerja sama perdagangan bebas lingkup Bilateral dan Multilateral						Dit. KSIKC
		1.1.1.11	Pencapaian kesepakatan dalam perundingan kerja sama perdagangan bebas lingkup Regional						Dit. KSIKC
		1.1.1.12	Penyusunan rumusan kebijakan implementasi kerja sama perdagangan bebas yang berlaku di Indonesia						Dit. KSIKC
		1.1.1.13	Penguatan peran DJBC sebagai Pusat Pelatihan Internasional melalui WCO <i>Regional Entities</i>						Dit. KSIKC
		1.1.1.14	Penguatan posisi DJBC dalam penyusunan <i>Host Country Agreement</i> (HCA)						Dit. KSIKC
		1.1.1.15	Penyusunan kajian/hasil analisis terkait implementasi kebijakan kerja sama perdagangan bebas						Dit. KSIKC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		1.1.1.16	Penyusunan kajian/hasil analisis terkait kebijakan kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai						Dit. KSIKC
		1.1.1.17	Peningkatan efektivitas pemanfaatan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka fasilitasi perdagangan, serta perlindungan masyarakat dan negara						Dit. KSIKC
		1.1.1.18	Monitoring dan evaluasi atas implementasi pelaksanaan ketentuan kepabeanan dan cukai dalam perjanjian internasional						Dit. KSIKC
		1.1.1.19	Penyelenggaraan pertemuan dan/atau perundingan internasional						Dit. KSIKC
		1.1.1.20	Peningkatan peran DJBC dalam kegiatan pengembangan kapasitas internasional						Dit. KSIKC
		1.1.1.21	Penguatan peran pegawai DJBC dalam lembaga internasional						Dit. KSIKC
		1.1.1.22	Rekomendasi kebijakan <i>Free Trade Agreement</i> melalui <i>Verification Visit</i>						Dit. KSIKC
		1.1.1.23	Aksesi Indonesia dalam forum BRICS						Dit. KSIKC
		1.1.1.24	Aksesi Indonesia dalam forum <i>Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)</i>						Dit. KSIKC
		1.1.1.25	Evaluasi utilisasi FTA untuk barang konsumsi						Dit. KSIKC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
	dukungan terhadap ekspor produk UMKM	1.2.4.2	Promosi ekspor UMKM: akses pasar ekspor UMKM dengan kolaborasi berbagai entitas						Dit. Fasilitas
		1.2.4.3	Evaluasi promosi ekspor UMKM						Dit. Fasilitas
		1.2.4.4	Sertifikasi UMKM Binaan						Dit. Fasilitas
1.3 Arah Kebijakan Implementasi Ekonomi Hijau									
1.3.1	Pemberian insentif fiskal guna mendorong pengembangan energi ramah lingkungan seperti energi baru terbarukan dan <i>Green Customs Initiative</i>	1.3.1.1	Penyusunan kajian kepatuhan dan pemberian fasilitas hulu migas dan/atau energi baru terbarukan						Dit. Fasilitas
		1.3.1.2	Penyusunan rumusan kebijakan dan implementasi terkait pemberian fasilitas hulu migas dan/atau energi baru terbarukan (PMK)						Dit. Fasilitas
2. Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
2.1 Arah Kebijakan Perlindungan Masyarakat yang Efektif									
2.1.1	Peningkatan kapasitas pengawasan kepabeanan dan cukai, termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor	2.1.1.1	Pengadaan <i>Personal Protective Equipment (PPE)</i> dan <i>Less Lethal Weapon (LLW)</i> dalam rangka memberikan perlindungan bagi para petugas DJBC dari potensi resistensi fisik di lapangan, serta guna efektivitas pengawasan DJBC						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		2.1.1.2	Penguatan fungsi alat digital forensik dalam penanganan perkara di bidang kepabeanan dan cukai dan/atau TPPU						Dit. P2
		2.1.1.3	Pengadaan <i>Mobile X-ray Scanvan</i> untuk pengawasan kepabeanan dan cukai						Dit. P2
		2.1.1.4	Pemeliharaan alat pemindai untuk pengawasan kepabeanan dan cukai						Dit. P2
		2.1.1.5	Pengembangan pengawasan dengan <i>Drone</i>						Dit. P2
		2.1.1.6	Pengadaan berkelanjutan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak (<i>Drone</i>) sesuai kebutuhan						Dit. P2
		2.1.1.7	Modernisasi Peralatan Komunikasi (Radio HT <i>Digital</i> , <i>Base Station</i> /Radio Mobil Digital, <i>Repeater Digital</i>)						Dit. P2
		2.1.1.8	Pengadaan kapal patroli FPB sebanyak 5 (lima) unit (3 kapal FPB 38 dan 2 kapal FPB 28)						Dit. P2
		2.1.1.9	Revitalisasi kapal patroli FPB 28 kayu						Dit. P2
		2.1.1.10	Revitalisasi <i>Speedboat</i>						Dit. P2
		2.1.1.11	Pembangunan <i>Coastal Surveillance System</i>						Dit. P2
		2.1.1.12	<i>Repowering</i> (penggantian) mesin kapal patroli						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		2.1.1.13	Modernisasi peralatan navigasi dan penginderaan, peralatan komunikasi, serta sistem informasi di kapal patroli FPB						Dit. P2
		2.1.1.14	Optimalisasi alat pemindai dalam peningkatan pelayanan dan pengawasan ekspor dan impor						Dit. P2
		2.1.1.15	Penataan ulang PSO BC dan perbaikan sarana prasarana pendukung PSO BC lainnya						Dit. P2
		2.1.1.16	Pengadaan <i>Handheld X-Ray</i>						Dit. P2
		2.1.1.17	Pengadaan kapal patroli FPB sebagai pengganti FPB 28 kayu						Dit. P2
		2.1.1.18	Pengadaan <i>Speedboat</i>						Dit. P2
		2.1.1.19	Pengadaan dan sertifikasi Alat Digital Forensik						Dit. P2
		2.1.1.20	Penambahan RUTAN baru						Dit. P2
		2.1.1.21	Modernisasi Senjata Api Dinas DJBC						Dit. P2
		2.1.1.22	Renovasi kapal patroli <i>Speedboat</i> eks PSP						Dit. P2
		2.1.1.23	Revitalisasi Sistem Pemindai						Dit. P2
		2.1.1.24	Pengembangan sarana dan prasarana operasi						Dit. P2
		2.1.1.25	Pengembangan Digital Forensik						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		2.1.1.26	Revitalisasi kapal patroli dan <i>Speedboat</i>						Dit. P2
		2.1.1.27	Modernisasi fasilitas Unit K-9						Dit. IN
		2.1.1.28	Pengadaan calon Anjing Pelacak (K-9) baru						Dit. IN
		2.1.1.29	Penyediaan sarana operasi NPP						Dit. IN
		2.1.1.30	Pemeliharaan dan perbaikan sarana operasi NPP						Dit. IN
		2.1.1.31	Relokasi sarana operasi NPP						Dit. IN
		2.1.1.32	Monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana operasi NPP						Dit. IN
2.1.2	Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya) dan penegakan hukum	2.1.2.1	Penyusunan perubahan ketentuan penelitian dugaan tindak pidana di bidang cukai						Dit. P2
		2.1.2.2	Penyusunan perubahan ketentuan penghentian penyidikan di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara						Dit. P2
		2.1.2.3	Operasi Patroli Laut Bea Cukai Terpadu dan Khusus						Dit. P2
		2.1.2.4	Optimalisasi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai di pesisir timur Sumatera dan wilayah rawan lainnya						Dit. P2
		2.1.2.5	Penyempurnaan regulasi terkait pengawasan laut						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		2.1.2.6	Perbaikan regulasi terkait teknis penegakan hukum						Dit. P2
		2.1.2.7	Penguatan pengawasan ekspor-impor melalui Satgas Pengawasan						Dit. P2
		2.1.2.8	Penyusunan rumusan kebijakan tata laksana pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak (<i>Drone</i>)						Dit. P2
		2.1.2.9	Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak (<i>Drone</i>) untuk pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai						Dit. P2
		2.1.2.10	Penyusunan NK/PKS dengan K/L, APH, dan/atau pihak lainnya dalam rangka sinergi penegakan hukum						Dit. P2
		2.1.2.11	Monitoring dan evaluasi NK/PKS dengan K/L dan/atau APH						Dit. P2
		2.1.2.12	Penyusunan ketentuan teknis terkait pemanfaatan Digital Forensik						Dit. P2
		2.1.2.13	Sinergi operasi penindakan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai bersama dengan APH						Dit. P2
		2.1.2.14	Sinergi dan koordinasi dalam strategi pengawasan serta <i>hot issue</i> di bidang kepabenan dan cukai						Dit. P2
		2.1.2.15	Pendataan dan profiling kinerja PPNS dan <i>Forensor</i>						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
2.1.3	Penguatan peran pengawasan <i>post clearance</i>	2.1.3.1	Penguatan Audit Kepabeanan dan Cukai						Dit. Audit
		2.1.3.2	Penyusunan rumusan kebijakan terkait Audit Kepabeanan dan Cukai (PDJ)						Dit. Audit
		2.1.3.3	Penyusunan rumusan kebijakan terkait Penelitian Ulang (Penul) (PDJ)						Dit. Audit
		2.1.3.4	Penyusunan rumusan kebijakan terkait Pemeriksaan Tujuan Tertentu (PTT) (PMK)						Dit. Audit
		2.1.3.5	Penyusunan rumusan kebijakan terkait Pemeriksaan Tujuan Tertentu (PTT) (PDJ)						Dit. Audit
		2.1.3.6	Keikutsertaan aktif pada bidang PCA dalam forum internasional						Dit. Audit
		2.1.3.7	Pelaksanaan <i>PCC Talk</i>						Dit. Audit
		2.1.3.8	<i>Coaching Clinic</i> Audit Kepabeanan dan Cukai						Dit. Audit
		2.1.3.9	Optimalisasi pemanfaatan <i>Smart PCC</i> di Unit Vertikal						Dit. Audit
		2.1.3.10	Penguatan penelitian ulang di Unit Vertikal						Dit. Audit
		2.1.3.11	Optimalisasi kegiatan monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas di Unit Vertikal						Dit. Audit

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		2.1.3.12	Analisis bersama terhadap NPWP Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai berisiko tinggi						Dit. Audit
2.1.4	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	2.1.4.1	Pelaksanaan Operasi Serentak dan Terpadu Barang Kena Cukai ilegal						Dit. P2
		2.1.4.2	Penguatan pengawasan BKC ilegal melalui Satgas Pengawasan						Dit. P2
		2.1.4.3	Pelaksanaan survei rokok ilegal oleh pihak eksternal						Dit. TFC
		2.1.4.4	Asistensi pemanfaatan DBH CHT untuk menekan peredaran BKC ilegal dan sosialisasi di bidang cukai						Dit. TFC
		2.1.4.5	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan pajak rokok untuk menekan peredaran BKC ilegal dan sosialisasi di bidang cukai						Dit. TFC
		2.1.4.6	Penguatan pemanfaatan APHT						Dit. TFC
		2.1.4.7	Percepatan registrasi perizinan pabrik (konversi) dan memfasilitasi pabrik naik golongan (naik kelas)						Dit. TFC
		2.1.4.8	Sistem Pengawasan Terintegrasi Barang Kena Cukai (SPT BKC) - Modernisasi Sistem Penghitungan Produksi BKC						Dit. TFC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		2.1.4.9	Pembatasan Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai (P3C) berbasis AI (<i>Intercept Cukai Ilegal</i> melalui Pemanfaatan <i>Risk Engine</i>)						Dit. TFC
2.1.5	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)	2.1.5.1	Patroli pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor						Dit. IN
		2.1.5.2	Operasi pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor						Dit. IN
		2.1.5.3	<i>Joint Task Force on Narcotics</i>						Dit. IN
		2.1.5.4	Pengembangan <i>Drugs Signature Library</i>						Dit. IN
		2.1.5.5	<i>Joint Analysis</i> bersama dengan Aparat Penegak Hukum						Dit. IN
		2.1.5.6	Pertukaran data dan/atau informasi NPP bersama dengan negara lain/organisasi internasional dalam rangka kerja sama intelijen						Dit. IN
		2.1.5.7	Pertukaran data dan/atau informasi NPP bersama dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka P4GN						Dit. IN
		2.1.5.8	Partisipasi aktif dalam forum pertemuan internasional di bidang NPP						Dit. IN
		2.1.5.9	Monitoring dan evaluasi pengawasan di bidang NPP						Dit. IN
		2.1.5.10	<i>Joint Task Force on Illegal Goods</i>						Dit. IN
	2.1.5.11	Pengembangan kapasitas Unit K-9						Dit. IN	

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		2.1.5.12	Pengembangan Unit K-9						Dit. IN
		2.1.5.13	Pengembangan kompetensi dengan penyelenggaraan pelatihan K-9 yang bersifat internasional di Kawasan Asia Pasifik						Dit. IN
		2.1.5.14	<i>Joint Analysis</i> dan asistensi pengawasan NPP dengan Satker Vertikal DJBC (Kanwil/KPU)						Dit. IN
2.1.6	Pencegahan dan penanganan kejahatan lintas negara	2.1.6.1	<i>Joint Analysis</i> dan <i>Case Building</i> dengan PPATK terkait CBCC dan/atau TBML						Dit. P2
		2.1.6.2	<i>Updating Sectoral Risk Assessment (SRA)</i> DJBC terkait CBCC						Dit. P2
		2.1.6.3	Operasi intelijen terkait CBCC dan/atau TBML						Dit. P2
		2.1.6.4	Operasi intelijen di bidang HKI						Dit. P2
		2.1.6.5	Operasi intelijen dalam rangka pengawasan atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme, kejahatan di bidang pendanaan terorisme, kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, kejahatan di bidang benda cagar budaya, dan/atau Kejahatan Lintas Negara Lainnya						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		2.1.6.6	<i>Joint Analysis</i> dan Operasi Bersama Pengawasan atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme, kejahatan di bidang pendanaan terorisme, kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, kejahatan di bidang benda cagar budaya, dan/atau Kejahatan Lintas Negara Lainnya						Dit. P2
		2.1.6.7	Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional						Dit. KSIKC
2.1.7	Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan <i>Other Government Agencies</i> (OGA) di perbatasan	2.1.7.1	Sinergi bersama K/L lainnya melalui kegiatan operasi atau patroli bersama dan/atau pertukaran data terkait pengawasan dan penegakan hukum di laut						Dit. P2
		2.1.7.2	Peningkatan kerja sama pengawasan laut dengan negara lain dan lembaga internasional						Dit. P2
2.1.8	Kebijakan kepabeanan yang adaptif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti <i>Green Customs Initiative</i> dan <i>Blue Economy</i>	2.1.8.1	Keikutsertaan aktif dalam forum internasional terkait pengaturan atas zat-zat berbahaya untuk kepentingan nasional						Dit. Teknis
		2.1.8.2	Penyusunan rumusan kebijakan dan implementasi terkait impor sementara dan ekspor sementara <i>returnable package</i>						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		2.1.8.3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan <i>Green Customs</i>						Dit. KSIKC
2.1.9	Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.								Kanwil DJBC dan atau/ KPUBC
2.2 Arah Kebijakan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Kontributif									
2.2.1	Pengawasan penerima fasilitas yang efisien dan efektif berbasis digital	2.2.1.1	Optimalisasi pelaksanaan Monitoring Khusus dengan fokus pada perusahaan penerima fasilitas						Dit. P2
		2.2.1.2	Integrasi data hasil Monitoring Umum, Monitoring Khusus, Penul, hasil Audit, serta tindak lanjutnya pada aplikasi <i>Smart Customs - Profil Perusahaan</i>						Dit. Fasilitas
2.2.2	Penguatan peran dalam rangka Keamanan Rantai Pasok Global	2.2.2.1	Penguatan peran AEO dan MITA dalam rangka Keamanan Rantai Pasok Global dan fasilitasi perdagangan						Dit. Teknis
2.2.3	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah								Kanwil DJBC dan atau/ KPUBC
3. Tujuan Pendapatan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Maksimal, Berkeadilan, dan Mendukung Perekonomian Nasional									
3.1 Arah Kebijakan Transformasi di Bidang Regulasi, Proses Bisnis, Data dan Layanan terkait Pendapatan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai									
3.1.1	Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan kepabeanan dan cukai	3.1.1.1	Penyusunan proyeksi penerimaan kepabeanan dan cukai						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.1.1.2	Penyusunan distribusi target penerimaan pada unit vertikal						Dit. PPS
		3.1.1.3	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi distribusi target penerimaan kepabeanaan dan cukai						Dit. PPS
		3.1.1.4	Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerjasama DJBC-Perbankan						Dit. PPS
		3.1.1.5	Penyusunan panduan kebijakan cukai HT jangka menengah						Dit. TFC
		3.1.1.6	Monitoring dan evaluasi panduan penyusunan kebijakan cukai hasil tembakau jangka menengah						Dit. TFC
		3.1.1.7	Penyusunan rumusan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang berlandaskan 4 pilar kebijakan, yaitu pengendalian, penerimaan, tenaga kerja, dan dampak ke rokok ilegal						Dit. TFC
		3.1.1.8	Monitoring dan evaluasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang telah diberlakukan						Dit. TFC
		3.1.1.9	Monitoring dan evaluasi kebijakan Pemantauan Harga Transaksi Pasar Hasil Tembakau.						Dit. TFC
		3.1.1.10	Monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT sebagai bantalan kebijakan cukai hasil tembakau						Dit. TFC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.1.1.11	Penyusunan, penyesuaian, dan/atau kalibrasi model penghitungan <i>tax simulation</i> kebijakan cukai hasil tembakau bersama DSP-DJSEF						Dit. TFC
		3.1.1.12	Monitoring dan evaluasi dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap 4 pilar kebijakan, yaitu pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal						Dit. TFC
		3.1.1.13	Survei tenaga kerja industri hasil tembakau						Dit. TFC
		3.1.1.14	Penyusunan kebijakan Tarif Cukai Etil Alkohol (EA), Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (KMEA)						Dit. TFC
		3.1.1.15	Monitoring dan evaluasi kebijakan Tarif Cukai Etil Alkohol (EA), Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Barang Kena Cukai Lainnya selain Hasil Tembakau (HT)						Dit. TFC
		3.1.1.16	Monitoring Harga Jual Eceran/ Harga Transaksi Pasar (HJE/HTP) Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)						Dit. TFC
		3.1.1.17	Monitoring dan evaluasi terkait penyediaan Pita Cukai						Dit. TFC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.1.1.18	Monitoring dan evaluasi terkait pemberian fasilitas dan kemudahan pembayaran cukai						Dit. TFC
		3.1.1.19	Penyusunan kajian dampak ekonomi fasilitas pembebasan EA						Dit. TFC
		3.1.1.20	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan analisis dokumen cukai oleh unit vertikal						Dit. TFC
		3.1.1.21	Monitoring dan evaluasi terkait dengan kluster perizinan, produksi, penyelesaian, dan perdagangan						Dit. TFC
		3.1.1.22	Penyusunan kajian penyempurnaan ketentuan terkait dengan kluster perizinan, produksi, penyelesaian, dan perdagangan						Dit. TFC
		3.1.1.23	Penyempurnaan rumusan kebijakan di bidang cukai						Dit. TFC
		3.1.1.24	Monitoring dan evaluasi pencacahan Barang Kena Cukai						Dit. TFC
		3.1.1.25	Penyempurnaan rumusan kebijakan pencacahan Barang Kena Cukai						Dit. TFC
		3.1.1.26	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai dengan kluster perizinan, produksi, penyelesaian, dan perdagangan						Dit. TFC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.1.1.27	Penyusunan rekomendasi kebijakan tarif cukai Hasil Tembakau dari aspek keberlangsungan tenaga kerja						Dit. TFC
		3.1.1.28	Penyusunan rekomendasi kebijakan cukai akibat peralihan konsumsi produk Hasil Tembakau yang lebih murah (<i>Downtrading</i>)						Dit. TFC
		3.1.1.29	Penyusunan rekomendasi kebijakan tarif cukai dari Aspek Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Ilegal						Dit. TFC
		3.1.1.30	Pelaksanaan <i>Survey</i> MMEA dan EA <i>illegal</i>						Dit. TFC
		3.1.1.31	<i>Reengineering</i> proses bisnis cukai						Dit. TFC
		3.1.1.32	Simplifikasi tarif dan penyesuaian HJE Cukai Hasil Tembakau secara berkala						Dit. TFC
		3.1.1.33	Penyesuaian tarif MMEA secara berkala						Dit. TFC
		3.1.1.34	Penyusunan kajian terkait sinkronisasi perijinan cukai dengan peraturan daerah (SIUP-MB)						Dit. TFC
		3.1.1.35	Pemusatan Pejabat Peneliti Dokumen & pengelompokkan berdasarkan kelompok komoditi						Dit. Teknis
		3.1.1.36	Optimalisasi PNBP dari layanan DJBC						Dit. KBP
3.1.2	Penyempurnaan administrasi penerimaan kepabeanan dan	3.1.2.1	Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan perpajakan						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
	cukai yang lebih sederhana dan efisien	3.1.2.2	Penyusunan Laporan Keuangan (piutang)						Dit. PPS
		3.1.2.3	Penyusunan analisis basis penerimaan						Dit. PPS
		3.1.2.4	Penyusunan bahan <i>Asset Liabilities Committee</i> terkait perkembangan perdagangan internasional dan penerimaan kepabeanan dan cukai						Dit. PPS
		3.1.2.5	Pengadaan Pita Cukai						Dit. TFC
3.1.3	Perbaiki tata cara pengawasan kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai	3.1.3.1	Pemanfaatan Data PPATK, Pajak dan/atau K/L lainnya untuk transaksi perdagangan internasional						Dit. Audit
		3.1.3.2	Optimalisasi penggunaan alat pemindai sebagai pemeriksaan pendahuluan pada pelabuhan besar						Dit. Teknis
3.1.4	Penguatan proses bisnis keberatan, serta peningkatan kemenangan sengketa banding dan upaya hukum lainnya	3.1.4.1	Penanganan perkara sengketa keberatan, banding, dan sengketa hukum lainnya						Dit. KBP
		3.1.4.2	Peningkatan kualitas dan pemahaman hukum dalam penetapan keberatan, penanganan sengketa banding, dan pengajuan Peninjauan Kembali						Dit. KBP
		3.1.4.3	Penyebarluasan hasil evaluasi putusan banding dalam rangka penyelarasan dan implementasi peraturan						Dit. KBP

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.1.4.4	Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka penanganan perkara						Dit. KBP
3.1.5	Perbaiki proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien	3.1.5.1	Penyusunan rumusan kebijakan terkait pelayanan kepabeanan terhadap Impor Sementara Kapal Wisata Asing						Dit. Teknis
		3.1.5.2	Penyusunan rumusan kebijakan terkait pelayanan kepabeanan terhadap Impor Sementara						Dit. Teknis
		3.1.5.3	Penyusunan rumusan kebijakan terkait pelayanan Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas						Dit. Teknis
		3.1.5.4	Penyempurnaan kebijakan yang mengatur perlakuan terhadap barang kiriman hasil transaksi perdagangan dan non-transaksi perdagangan (PMK)						Dit. Teknis
		3.1.5.5	Monitoring, evaluasi dan penyesuaian ketentuan kepabeanan ekspor kendaraan dalam bentuk jadi (<i>Completely Built Up</i>)						Dit. Teknis
		3.1.5.6	Monitoring, evaluasi, dan persiapan penyesuaian ketentuan kepabeanan ekspor CPO dan Produk Turunannya						Dit. Teknis
		3.1.5.7	Penyusunan rumusan kebijakan terkait ketentuan kepabeanan ekspor CPO dan Produk Turunannya						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.1.5.8	Monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan terkait Ekspor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut						Dit. Teknis
		3.1.5.9	Monitoring dan evaluasi ketentuan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor						Dit. Teknis
		3.1.5.10	Penyempurnaan ketentuan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor barang kiriman						Dit. Teknis
		3.1.5.11	Pelaksanaan survei dan evaluasi <i>Time Release Study</i>						Dit. Teknis
		3.1.5.12	Penyusunan rumusan kebijakan terkait <i>transshipment</i> (PMK)						Dit. Teknis
		3.1.5.13	Penyusunan rumusan kebijakan terkait <i>transshipment</i> (PDJ)						Dit. Teknis
		3.1.5.14	Penyusunan rumusan kebijakan ketentuan Pemberitahuan Pabean Impor						Dit. Teknis
		3.1.5.15	Peningkatan pelayanan dan pengawasan barang impor dan/atau ekspor pada proses bisnis angkut lanjut, pindah lokasi penimbunan, dan ijin timbun dengan menggunakan <i>e-seal</i>						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.1.5.16	Penyusunan rumusan kebijakan atas peraturan Impor Sementara dengan menggunakan <i>Carnet</i> atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan <i>Carnet</i>						Dit. Teknis
		3.1.5.17	Monitoring dan evaluasi peraturan Impor Sementara dengan menggunakan <i>Carnet</i> atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan <i>Carnet</i>						Dit. Teknis
		3.1.5.18	Monitoring dan evaluasi implementasi PMK dan SKP Barang Pindahan						Dit. Teknis
		3.1.5.19	Penyempurnaan ketentuan Impor Sementara						Dit. Teknis
		3.1.5.20	Penyederhanaan proses bisnis Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai						Dit. Teknis
		3.1.5.21	Penataan Konsolidator Ekspor						Dit. Teknis
		3.1.5.22	Perbaikan proses bisnis penanganan Barang Individu						Dit. Teknis
		3.1.5.23	Perumusan kebijakan lartas						Dit. Teknis
		3.1.5.24	Penyederhanaan <i>layer</i> tarif untuk Bea Keluar (SDA dan mineral, antara lain CPO, Batubara, Emas)						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.1.5.25	Penyusunan <i>guidance</i> dalam menginterpretasikan peraturan						Dit. Teknis
		3.1.5.26	Penyempurnaan regulasi dan koordinasi terkait probis ekspor						Dit. Teknis
		3.1.5.27	Penyempurnaan regulasi dan/atau koordinasi dalam rangka kebijakan perdagangan di perbatasan dan operasional pelayanan di perbatasan.						Dit. Teknis
		3.1.5.28	Penguatan NLE						Dit. IKC
		3.1.5.29	Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan integrasi perizinan dan dokumen K/L di sistem Indonesia <i>National Single Window</i> (INSW)						Dit. IKC
3.1.6	Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit Eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP);	3.1.6.1	Interoperabilitas Sistem Coretax, CEISA dan SIMPONI						Dit. PPS
3.1.7	Penguatan layanan penerimaan kepabeanan dan cukai berbasis digital	3.1.7.1	Perluasan penggunaan mekanisme pembayaran melalui QRIS						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
3.2 Arah Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai									
3.2.1	Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi penerimaan kepabeanaan dan cukai	3.2.1.1	Penguatan analisis dan targeting di unit vertikal						Dit. Audit
3.2.2	Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui <i>single profile</i> Pengguna Jasa Kepabeanaan dan Cukai	3.2.2.1	Pengembangan sistem aplikasi Profil Pengusaha BKC sebagai <i>tools</i> Manajemen Risiko dalam kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai						Dit. TFC
3.2.3	Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru	3.2.3.1	Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Perluasan Basis Penerimaan - Bea Keluar Mineral						Dit. PPS
		3.2.3.2	Penyusunan kajian terkait kebijakan fiskal berupa cukai atas barang yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan						Dit. TFC
		3.2.3.3	Penyusunan kajian terkait kebijakan fiskal berupa cukai atas barang yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan						Dit. TFC
		3.2.3.4	Penyusunan kajian ekstensifikasi BKC Baru						Dit. TFC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.2.3.5	Penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dengan memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia membaik						Dit. TFC
		3.2.3.6	Perluasan cukai atas barang yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan						Dit. TFC
		3.2.3.7	Perluasan cukai atas barang yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan						Dit. TFC
3.2.4	Penguatan program intensifikasi bea masuk, bea keluar, dan cukai	3.2.4.1	Pelaksanaan dialog penerimaan						Dit. PPS
		3.2.4.2	Rumusan kebijakan penyesuaian tarif BK Sawit untuk mengurangi terjadinya Anomali <i>Shifting</i> Komoditi Ekspor Turunan Sawit						Dit. Teknis
		3.2.4.3	Pengenaan tarif <i>barrier</i> dengan skema Bea Masuk Tambahan (BMAD, BMI, BMTP) untuk melindungi industri dalam negeri						Dit. Teknis
		3.2.4.4	Penguatan sinkronisasi kebijakan antar unit kerja guna peningkatan kinerja di bidang cukai						Dit. TFC
		3.2.4.5	Koordinasi dan pemantauan kinerja penerimaan di bidang cukai pada satuan kerja						Dit. TFC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
3.3 Arah Kebijakan Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kepatuhan terhadap Kewajiban Penerimaan Negara									
3.3.1	Pengawasan kepatuhan Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai, dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui <i>Big Data/Advanced Analytics</i> dan kecerdasan buatan (<i>Intelligence-Led Compliance</i>)	3.3.1.1	Optimalisasi hasil monev audit untuk peningkatan tingkat kepatuhan pengguna jasa						Dit. Audit
		3.3.1.2	Pemutakhiran Rasio Analisis Dokumen Cukai						Dit. TFC
		3.3.1.3	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kepatuhan pengusaha BKC oleh unit vertikal						Dit. TFC
3.3.2	Optimalisasi kegiatan <i>joint</i> program penerimaan negara	3.3.2.1	Optimalisasi penerimaan negara melalui <i>Joint</i> Pengawasan						Dit. Audit
		3.3.2.2	Optimalisasi pelaksanaan <i>Joint Audit</i>						Dit. Audit
		3.3.2.3	<i>Joint</i> Penagihan (<i>Collection</i>)						Dit. PPS
		3.3.2.4	Pelaksanaan <i>Joint</i> Penegakan Hukum						Dit. P2
3.3.3	Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang kepabeanan dan cukai	3.3.3.1	Penyusunan peraturan di bidang perbendaharaan						Dit. PPS
		3.3.3.2	Penghapusan piutang tak tertagih di bidang kepabeanan dan cukai						Dit. PPS
		3.3.3.3	Monitoring dan evaluasi perbendaharaan						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.3.3.4	Penguatan peran Juru Sita						Dit. PPS
3.3.4	Penguatan nilai pabean dan klasifikasi barang	3.3.4.1	Keikutsertaan aktif dalam forum CPTFWG (<i>Customs Procedure and Trade Facilitation Working Group</i>) di ASEAN terkait nilai pabean untuk kepentingan Indonesia						Dit. Teknis
		3.3.4.2	Keikutsertaan aktif dalam forum WCO untuk sidang TCCV (<i>Technical Committee Customs Valuation</i>) terkait nilai pabean untuk kepentingan Indonesia						Dit. Teknis
		3.3.4.3	Standardisasi uraian barang sebagai sumber database <i>risk assessment</i> nilai pabean						Dit. Teknis
		3.3.4.4	Keikutsertaan aktif dalam forum internasional terkait klasifikasi barang untuk kepentingan Indonesia di bidang industri dan perdagangan						Dit. Teknis
		3.3.4.5	Perumusan BTKI 2028						Dit. Teknis
		3.3.4.6	Penguatan BLBC dalam rangka meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam hasil pengujian dan identifikasi barang serta peran aktif sebagai WCO <i>Regional Customs Laboratory A/P</i>						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		3.3.4.7	Penyusunan rumusan kebijakan tentang Tatalaksana Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean						Dit. Teknis
		3.3.4.8	Penyusunan rumusan kebijakan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk						Dit. Teknis
		3.3.4.9	Keikutsertaan aktif dalam forum WTO untuk sidang CCV (<i>Committee of Customs Valuation</i>) terkait nilai pabean untuk memperkuat posisi runding Indonesia di forum Internasional						Dit. Teknis
		3.3.4.10	Penyusunan perubahan atas PMK tentang Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor sebelum Pemberitahuan Pabean						Dit. Teknis
		3.3.4.11	Implementasi <i>e-invoicing</i> untuk impor						Dit. Teknis
3.3.5	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah								Kanwil DJBC dan atau/ KPUBC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
4. Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Organisasi dan Teknologi Informasi dalam Kerangka Budaya Kemenkeu Satu, yang Mendorong Akselerasi Transformasi Birokrasi Nasional									
4.1 Arah Kebijakan Penguatan Budaya									
4.1.1	Penguatan budaya organisasi, integritas, kompetensi, <i>leadership</i> , ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kolaborasi lintas generasi, serta perbaikan instrumen komunikasi pegawai	4.1.1.1	Penguatan budaya DJBC						Setditjen
		4.1.1.2	Penyusunan rumusan kebijakan terkait Budaya Organisasi						Dit. PPS
		4.1.1.3	Monitoring dan evaluasi Budaya Organisasi DJBC						Dit. PPS
		4.1.1.4	Pengelolaan komunikasi internal yang efektif						Dit. KBPJ
4.1.2	Penguatan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai dan institusi melalui penguatan manajemen risiko dan pengawasan manajemen risiko	4.1.2.1	Penyusunan risiko APBN Kontijensi dan Neraca (AKN)						Dit. PPS
		4.1.2.2	Pengelolaan administrasi Manajemen Risiko						Dit. PPS
		4.1.2.3	Monitoring dan evaluasi Manajemen Risiko						Dit. PPS
		4.1.2.4	Pelaksanaan edukasi Manajemen Risiko						Dit. PPS
		4.1.2.5	Penyusunan regulasi Manajemen Risiko						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.1.2.6	Monitoring dan evaluasi Manajemen Keberlangsungan Bisnis						Dit. PPS
4.1.3	Penguatan integritas dalam upaya memitigasi risiko pegawai dan mewujudkan perilaku etis dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu	4.1.3.1	Penyusunan rumusan kebijakan Penghargaan dan Pembinaan Disiplin Pegawai secara optimal						Setditjen
		4.1.3.2	Pelaksanaan program Pembinaan Mental						Dit. KI
4.1.4	Optimalisasi pola kerja baru yang didukung <i>office automation</i> sebagai upaya penguatan budaya sinergi/kolaborasi	4.1.4.1	Penyusunan Desain Budaya Organisasi & <i>New Way of Working</i> untuk menyesuaikan perkembangan Probis dan TI						Dit. PPS
4.1.5	Pengembangan desain kebijakan yang berorientasi pada perluasan dan peningkatan aspek <i>well-being</i> , kesejahteraan pegawai, serta penguatan program persiapan pensiun	4.1.5.1	Pemenuhan hunian pada satuan kerja						Setditjen
		4.1.5.2	Pemenuhan Alat Angkut Kendaraan Bermotor Jabatan, Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional						Setditjen
		4.1.5.3	Peningkatan kesejahteraan pegawai						Setditjen
4.2 Arah Kebijakan Transformasi Pengelolaan Sumber Daya dan Pengendalian Intern									
4.2.1	Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas	4.2.1.1	Penyempurnaan kelembagaan instansi vertikal DJBC						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
	dan fungsi, serta rasionalisasi struktur organisasi	4.2.1.2	Implementasi organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan DJBC						Setditjen
		4.2.1.3	Reorganisasi Struktur Organisasi sesuai Alur Probis & TI						Setditjen
		4.2.1.4	Penguatan Organisasi TIK DJBC						Dit. IKC
		4.2.1.5	Penyusunan kajian reorganisasi Direktorat Penindakan dan Penyidikan						Dit. P2
		4.2.1.6	Penyusunan kajian tugas dan fungsi pada Direktorat KSIKC						Dit. KSIKC
		4.2.1.7	Penguatan tugas dan fungsi FTA pada unit vertikal DJBC dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja						Dit. KSIKC
4.2.2		Transformasi proses bisnis yang adaptif	4.2.2.1	Penyelesaian dan pengembangan lanjutan terhadap modul-modul aplikasi yang telah dirancang pada periode sebelumnya					
	4.2.2.2		Percepatan implementasi modul						Dit. IKC
	4.2.2.3		<i>Reengineering</i> aplikasi yang masih berjalan di lingkungan CEISA 3.0						Dit. IKC
	4.2.2.4		Penyelesaian program Renstra IKC yang terkait dengan SKP						Dit. IKC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.2.5	Pemenuhan permintaan maupun usulan program Renstra dan <i>Next Reform</i> yang berasal dari Pengampu Proses Bisnis						Dit. IKC
		4.2.2.6	Penyelesaian Aplikasi Mandiri						Dit. IKC
		4.2.2.7	Penyempurnaan Aplikasi SIAP TANDING						Dit. KBP
		4.2.2.8	Penyederhanaan Laporan Monev yang Terdigitalisasi dan Terintegrasi dengan <i>Single Dashboard</i>						Dit. KI
		4.2.2.9	Pengembangan sistem <i>Smart PCC</i>						Dit. Audit
		4.2.2.10	Pengembangan sistem Penelitian Ulang						Dit. Audit
		4.2.2.11	Pengembangan sistem Penilaian Kepatuhan Pengguna Jasa						Dit. Audit
		4.2.2.12	Pengembangan sistem e-Audit						Dit. Audit
		4.2.2.13	Penyempurnaan Audit, <i>Smart PCC</i> , e-Audit, serta penyusunan Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Audit Khusus						Dit. Audit
		4.2.2.14	Pengembangan modul Pengelolaan Penerimaan						Dit. PPS
		4.2.2.15	Penyusunan <i>Dashboard</i> Penerimaan						Dit. PPS
		4.2.2.16	Penyempurnaan Aplikasi Perbendaharaan						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.2.17	Penyusunan <i>Dashboard</i> Pengembalian						Dit. PPS
		4.2.2.18	Integrasi data SAPP dengan SAKTI						Dit. PPS
		4.2.2.19	Pengembangan sistem pengelolaan perencanaan strategis						Dit. PPS
		4.2.2.20	Integrasi Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak (<i>Drone</i>) dengan PUSKODAL DJBC						Dit. P2
		4.2.2.21	Pengembangan Sistem Puskodal untuk peningkatan kapasitas Puskodal Bea dan Cukai						Dit. P2
		4.2.2.22	Implementasi <i>Record of Ship Assessment</i> (ROSA)						Dit. P2
		4.2.2.23	Penyempurnaan Aplikasi CEISA Patla						Dit. P2
		4.2.2.24	Implementasi Otomasi Kegiatan Pengawasan						Dit. P2
		4.2.2.25	Pembangunan sistem Otomasi Pengajuan dan Penelitian Premi						Dit. P2
		4.2.2.26	Pemusatan Data Pelanggaran untuk optimalisasi <i>Ultimum Remedium</i>						Dit. P2
		4.2.2.27	Pembangunan CEISA Pengawasan						Dit. P2
		4.2.2.28	Perluasan pemanfaatan dan pengembangan Sistem <i>Cyber Crawling</i> dalam pengawasan BKC <i>illegal</i>						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.2.29	Penggunaan <i>Face Recognition</i> pada <i>gate</i> dan akses Data Imigrasi untuk mendukung <i>Face Recognition</i>						Dit. P2
		4.2.2.30	Penyesuaian parameter <i>Red Channel Management</i> atas transaksi berisiko tinggi						Dit. P2
		4.2.2.31	Pembangunan sistem Proses Bisnis Pengawasan (Integrasi Pelaporan Penindakan dan Penanganan Perkara)						Dit. P2
		4.2.2.32	Pengembangan sistem IT terkait pendalaman <i>profiling</i> barang (CITAC)						Dit. P2
		4.2.2.33	Pengembangan aplikasi terkait dengan kluster perizinan, produksi, penyelesaian, dan perdagangan						Dit. TFC
		4.2.2.34	Digitalisasi rangkaian kegiatan dalam rangka pemeriksaan kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai melalui penyusunan fitur Input Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan pada CEISA 4.0						Dit. TFC
		4.2.2.35	Pengimplementasian sistem otomasi internasional dalam lingkup aplikasi <i>ATA Carnet</i> di Indonesia						Dit. Teknis
		4.2.2.36	Pengimplementasian sistem otomasi Impor Sementara/Ekspor Sementara dengan menggunakan Dokumen <i>Carnet</i>						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.2.37	Penyusunan database secara nasional dalam rangka monitoring dan evaluasi pembongkaran dan penimbunan barang impor terkait dengan pengangkutan serta KP-TPS						Dit. Teknis
		4.2.2.38	Pengembangan lanjutan aplikasi pelayanan <i>transshipment</i> , termasuk PLP dan TPS Pusat Distribusi						Dit. Teknis
		4.2.2.39	Pengimplementasian Sistem Otomasi <i>Returnable Package</i>						Dit. Teknis
		4.2.2.40	Rekonsiliasi Pemberitahuan Pabean dengan Manifes						Dit. Teknis
		4.2.2.41	Pembangunan <i>Single Declaration Customs</i> , Imigrasi, dan Karantina						Dit. Teknis
		4.2.2.42	<i>Reengineering</i> Registrasi IMEI						Dit. Teknis
		4.2.2.43	Perbaikan layanan berbasis IT pada Barang Pindahan						Dit. Teknis
		4.2.2.44	Perbaikan pengelolaanan BTD, BDN dan BMMN						Dit. Teknis
		4.2.2.45	Penyempurnaan dan perluasan implementasi <i>Self Service Report (SSR-Mobile)/LHP Mobile/CEISA Mobile</i> secara nasional dan pengembangan pada probis ekspor SDA						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.2.55	Sentralisasi dan standarisasi data IT <i>Inventory</i> dan <i>tools</i> Kawasan Berfasilitas						Dit. Fasilitas
		4.2.2.56	Penguatan Sistem Pelacakan (Pengembangan dan Perluasan Implementasi Segel Elektronik (<i>e-Seal</i>))						Dit. Fasilitas
		4.2.2.57	Pengembangan Sistem Informasi Terpadu (SIT) Hulu Migas Antar K/L						Dit. Fasilitas
		4.2.2.58	Otomasi sistem pelayanan KITE						Dit. Fasilitas
		4.2.2.59	Otomasi fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk untuk Industri Kecil dan Menengah di sektor pertanian, peternakan, atau perikanan						Dit. Fasilitas
		4.2.2.60	Otomasi fasilitas pembebasan bea masuk kepada industri pengolah daur ulang limbah asal dalam negeri						Dit. Fasilitas
		4.2.2.61	Pemutakhiran Sistem Aplikasi CEISA 4.0 fitur KEK dan FTZ						Dit. Fasilitas
		4.2.2.62	Penerapan Data Analis dan CEISA 4.0 untuk pelaksanaan e-Monitoring TPB berbasis Data Transaksional						Dit. Fasilitas
		4.2.2.63	<i>Staging</i> Penerapan Sistem CNTC						Dit. IN
		4.2.2.64	Pengembangan Sistem CNTC menjadi CNTC v2						Dit. IN

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.2.65	Optimalisasi <i>Early Warning System</i> pada penyelenggaraan komunikasi publik						Dit. KBPJ
		4.2.2.66	Digitalisasi tata kelola administrasi PDN						Dit. KBPJ
		4.2.2.67	Pengelolaan Portal Berita Kepabeanan dan Cukai						Dit. KBPJ
		4.2.2.68	Peningkatan validitas, integrasi, dan pemanfaatan data SDM						Setditjen
4.2.3	Simplifikasi dan redesain EA dalam sistem informasi kepabeanan dan cukai guna mempercepat <i>reengineering</i> proses bisnis utama DJBC	4.2.3.1	Harmonisasi proses bisnis level operasional						Setditjen
		4.2.3.2	Pemutakhiran peta probis TIK DJBC (<i>Value Stream</i>)						Dit. IKC
		4.2.3.3	Penyusunan <i>Enterprise Architecture</i> TIK DJBC						Dit. IKC
		4.2.3.4	Penyelarasan <i>High Level Business Architecture</i>						Dit. IKC
4.2.4	Penyederhanaan birokrasi dan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara	4.2.4.1	Penguatan Jabatan Fungsional di bidang Keuangan Negara						Setditjen
4.2.5	Peningkatan kualitas perencanaan dan kompetensi SDM (termasuk <i>talent digital</i>), redesain sistem rekrutmen dan	4.2.5.1	Rekrutmen pegawai untuk memenuhi perkembangan Proses Bisnis dan Jumlah Layanan						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
	onboarding pegawai baru, serta pengembangan teknologi informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan	4.2.5.2	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM DJBC dengan mutasi dan promosi sesuai kompetensi secara berkesinambungan						Setditjen
		4.2.5.3	Penyusunan <i>Road Map</i> Manajemen SDM DJBC						Setditjen
		4.2.5.4	Pembangunan <i>Knowledge Management Systems</i> di DJBC						Setditjen
		4.2.5.5	Penguatan <i>Experts</i> Internal, Regional, & Internasional						Setditjen
		4.2.5.6	Optimalisasi implementasi <i>Learning Organization</i> (LO)						Setditjen
		4.2.5.7	Identifikasi dan pemenuhan kebutuhan <i>core competency</i> dalam mendukung pencapaian sasaran strategis						Setditjen
		4.2.5.8	Pembentukan <i>Customs Academy</i>						Setditjen
		4.2.5.9	Layanan Konseling, Psikoedukasi						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.5.10	Peningkatan kualitas dan pemahaman hukum dalam rangka pendampingan pegawai dalam menghadapi permasalahan hukum TUN, perdata, pidana, dan permintaan keterangan/sebagai ahli yang berasal dari pelaksanaan tusi DJBC						Dit. KBP
		4.2.5.11	Peningkatan kompetensi penyusunan peraturan di lingkungan DJBC						Dit. KBP
		4.2.5.12	Regenerasi Fungsional Audit dan Penul						Dit. Audit
		4.2.5.13	Sosialisasi dan internalisasi PMK Audit Kepabeanan Cukai dan PMK Pembukuan Kepabeanan Cukai						Dit. Audit
		4.2.5.14	Internalisasi PDJ Audit Kepabeanan dan Cukai						Dit. Audit
		4.2.5.15	Internalisasi dan sosialisasi PDJ Penul						Dit. Audit
		4.2.5.16	Sosialisasi terkait Pemeriksaan Tujuan Tertentu (PTT)						Dit. Audit
		4.2.5.17	Pelaksanaan diklat kategori keahlian, keterampilan, teknis dan pendukung lainnya untuk mendorong pemenuhan, pola karir, dan pengembangan SDM Wasla						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.5.18	Pelatihan dan sosialisasi penggunaan PPE dan peralatan pengamanan (<i>Less Lethal Weapon</i>)						Dit. P2
		4.2.5.19	Peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan dan/atau sosialisasi penggunaan sarana operasi pengawasan						Dit. P2
		4.2.5.20	Pelaksanaan pelatihan teknis operasional penindakan di bidang kepabeanan dan cukai						Dit. P2
		4.2.5.21	Pengembangan kapasitas pegawai di bidang pengawasan Kejahatan Lintas Negara						Dit. P2
		4.2.5.22	Peningkatan kapasitas Penyidik DJBC dalam proses penanganan perkara						Dit. P2
		4.2.5.23	Diklat dan sertifikasi terkait ilmu dan kemampuan Digital Forensik						Dit. P2
		4.2.5.24	Pelatihan identifikasi keaslian Pita Cukai						Dit. TFC
		4.2.5.25	Transformasi SDM Fasilitas TPB						Dit. Fasilitas
		4.2.5.26	Pelatihan dan operasi bersama dengan Unit Anjing Pelacak Instansi Penegak Hukum Lain						Dit. IN
		4.2.5.27	Pelatihan teknis tema pengawasan NPP						Dit. IN

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.5.28	Peningkatan kompetensi kehumasan dan manajemen organisasi						Dit. KBPJ
		4.2.5.29	Pelatihan / Workshop / Sosialisasi keterampilan pendukung kegiatan Publikasi Digital						Dit. KBPJ
		4.2.5.30	Penguatan dan optimalisasi SDM TIK DJBC						Dit. IKC
		4.2.5.31	Edukasi, internalisasi dan sosialisasi di bidang Kepatuhan Internal						Dit. KI
		4.2.5.32	Penguatan kompetensi Juru Sita						Dit. PPS
4.2.6	Penyempurnaan manajemen kinerja, manajemen karier, termasuk peningkatan kualitas <i>talent</i>	4.2.6.1	Optimalisasi Pusat Solusi dan Data Kinerja Kepabeanan dan Cukai						Dit. KI
		4.2.6.2	Pemetaan pengukuran kinerja proses bisnis DJBC						Dit. KI
		4.2.6.3	Penyusunan dokumen kinerja organisasi dan pegawai						Dit. KI
		4.2.6.4	Uji petik indikator kinerja <i>mandatory</i> dan/atau referensi						Dit. KI
		4.2.6.5	Evaluasi pengelolaan kinerja						Dit. KI
		4.2.6.6	Monitoring peningkatan kematangan pengelolaan kinerja						Dit. KI
		4.2.6.7	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi						Dit. KI

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.6.8	Implementasi dan monev Manajemen Karier di lingkungan DJBC						Setditjen
		4.2.6.9	Penyusunan Laporan Kinerja DJBC						Dit. PPS
4.2.7	Penguatan pengawasan terintegrasi dan terotomasi	4.2.7.1	Penguatan Integritas Pegawai dan Penerapan SPI Terintegrasi						Dit. KI
4.2.8	Pengendalian dan pengawasan internal	4.2.8.1	Penyusunan rumusan kebijakan di bidang Kepatuhan Internal						Dit. KI
		4.2.8.2	Pengawasan pegawai dalam pelaksanaan tugas						Dit. KI
		4.2.8.3	Pelaksanaan dan evaluasi investigasi internal						Dit. KI
		4.2.8.4	Pelaksanaan dan evaluasi pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Dit. KI
		4.2.8.5	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						Dit. KI
		4.2.8.6	Pengendalian <i>Intern</i> Pelaporan Keuangan (PIPK)						Dit. KI
		4.2.8.7	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)						Dit. KI
		4.2.8.8	Pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional						Dit. KI
		4.2.8.9	Analisis data dan informasi dalam rangka penegakan kepatuhan internal						Dit. KI
		4.2.8.10	Survei kinerja organisasi						Dit. KI

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.8.11	Penilaian, pemantauan dan evaluasi ZI WBK/WBBM unit kerja DJBC						Dit. KI
		4.2.8.12	Pengelolaan pengendalian Gratifikasi						Dit. KI
		4.2.8.13	Monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN						Dit. KI
		4.2.8.14	Penyelesaian dan pengelolaan pengaduan masyarakat						Dit. KI
		4.2.8.15	Pemantauan perilaku dan gaya hidup pegawai						Dit. KI
		4.2.8.16	Pendampingan penyusunan dan/atau pemutakhiran <i>Risk Control Matrix</i>						Dit. KI
		4.2.8.17	Penyelarasan <i>Service Level Agreement</i> dan <i>Key Performance Indicator</i> dengan K/L dan BUMN di sepanjang <i>Value Chain</i> kepebeanaan dan cukai						Dit. KI
		4.2.8.18	Penerapan <i>zero tolerance</i> terhadap <i>fraud</i>						Dit. KI
		4.2.8.19	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)						Setditjen
4.2.9	Pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel	4.2.9.1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang berkualitas						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.9.2	Pengelolaan belanja pegawai yang optimal						Setditjen
		4.2.9.3	Pelaksanaan anggaran yang berkualitas						Setditjen
		4.2.9.4	Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) DJBC						Setditjen
		4.2.9.5	Penguatan sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						Setditjen
4.2.10	Perencanaan strategis di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM yang handal	4.2.10.1	Penyusunan kajian/analisis organisasi DJBC						Dit. PPS
		4.2.10.2	Monitoring dan evaluasi Perencanaan Strategis						Dit. PPS
		4.2.10.3	Penyusunan Renstra DJBC 2025-2029						Dit. PPS
		4.2.10.4	Penyusunan Renja DJBC						Dit. PPS
		4.2.10.5	Monitoring dan evaluasi Renja DJBC						Dit. PPS
		4.2.10.6	Penyempurnaan probis DJBC						Dit. PPS
		4.2.10.7	Pengembangan penyusunan desain Kepemimpinan dan Karakter						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
4.2.11	Revitalisasi probis pembentukan peraturan perundangan di bidang Kepabeanaan dan Cukai	4.2.11.1	Penyempurnaan regulasi terkait penyusunan peraturan di lingkungan DJBC (SE)						Dit. KBP
		4.2.11.2	Koordinasi dengan pihak eksternal DJBC terkait dengan penyusunan peraturan						Dit. KBP
		4.2.11.3	Pelaksanaan Audit Regulasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki regulasi yang berisiko						Dit. KBP
		4.2.11.4	Pelaksanaan reuiu regulasi yang dianggap membuat citra bea cukai menjadi kurang baik.						Dit. KBP
4.2.12	Implementasi Pengarusutamaan Gender	4.2.12.1	Advokasi pimpinan dan pelaksanaan program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)						Setditjen
		4.2.12.2	Sertifikasi <i>Gender Focal Point</i>						Setditjen
		4.2.12.3	Peningkatan kualitas data dan analisis						Setditjen
		4.2.12.4	Peningkatan <i>tagging</i> Anggaran Responsif Gender						Setditjen
		4.2.12.5	Inovasi kebijakan/layanan yang menjadi <i>support system</i> pegawai (kebijakan internal)						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
4.2.13	Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis	4.2.13.1	Implementasi program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan						Dit. PPS
		4.2.13.2	Penyusunan Transformasi DJBC						Dit. PPS
		4.2.13.3	Monitoring dan evaluasi Transformasi DJBC						Dit. PPS
		4.2.13.4	Pengelolaan inovasi di lingkungan DJBC						Setditjen
4.2.14	Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal	4.2.14.1	Penguatan Analisis Beban Kerja di lingkungan DJBC						Setditjen
		4.2.14.2	Penyusunan rumusan kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Negara						Setditjen
		4.2.14.3	Pemenuhan Gedung Kantor dan Gedung Fungsional di Perbatasan/ <i>Remote Area</i> , Kawasan Ekonomi Khusus dan lain-lain						Setditjen
		4.2.14.4	Identifikasi Perangkat Pengguna yang diperlukan dan melakukan pengajuan kebutuhan perangkat pengguna						Setditjen
		4.2.14.5	Perencanaan dan pelaksanaan penghapusan atas perangkat pengguna yang usang (<i>obselete</i>)						Setditjen
		4.2.14.6	Pelaksanaan Hibah BMN kepada Lembaga Sosial/ Keagamaan/ Pendidikan yang bersifat non komersial						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.2.14.7	Pengamanan dan optimalisasi penggunaan aset di lingkungan DJBC						Setditjen
		4.2.14.8	Penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara						Setditjen
		4.2.14.9	Pemutakhiran data BMN dan penertiban kodefikasi barang						Setditjen
		4.2.14.10	Pelaksanaan sensus dan tindak lanjut sensus BMN						Setditjen
		4.2.14.11	Pelaksanaan asistensi, monitoring, dan evaluasi semua jenis metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada seluruh Satuan Kerja Vertikal DJBC, baik secara terjadwal maupun aksidental						Setditjen
		4.2.14.12	Optimalisasi PNPB dari Aset DJBC						Setditjen
		4.2.14.13	Modernisasi Kantor, serta pemenuhan Rumah Dinas dan Transportasi Kerja						Setditjen
		4.2.14.14	Monitoring dan evaluasi terkait kewenangan di lingkungan DJBC						Setditjen
		4.2.14.15	Penyusunan rumusan kebijakan terkait pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN internal Kementerian Keuangan						Dit. Teknis
4.2.15	Kebijakan Sumber Daya Organisasi dan Teknologi Informasi DJBC dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk <i>Green Customs Initiative</i>	4.2.15.1	Implementasi <i>Eco Office</i> di lingkungan DJBC						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
4.3 Arah Kebijakan Modernisasi dan Konsolidasi Ekosistem Kerja									
4.3.1	Modernisasi infrastruktur TIK dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan keandalan sistem, serta pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (<i>data enablement</i>)	4.3.1.1	Pembentukan tata kelola dan manajemen data di lingkungan DJBC						Dit. IKC
		4.3.1.2	Pemeliharaan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Sarana Pendukung CEISA						Dit. IKC
		4.3.1.3	Pemenuhan kapasitas Infrastruktur Aplikasi dan <i>Database</i> CEISA						Dit. IKC
		4.3.1.4	Peningkatan kapabilitas perangkat <i>network</i>						Dit. IKC
		4.3.1.5	<i>IT Asset Management System</i>						Dit. IKC
		4.3.1.6	Peningkatan kapabilitas <i>Management Backup and Recovery</i>						Dit. IKC
		4.3.1.7	Pengukuran <i>IT maturity and compliance</i>						Dit. IKC
		4.3.1.8	Infrastruktur Manajemen Data dan AI						Dit. IKC
		4.3.1.9	Pembangunan <i>SMART PCC Room</i>						Dit. Audit
4.3.2	Penguatan <i>integrated core system</i> DJBC dan penyempurnaan sistem informasi DJBC seperti	4.3.2.1	<i>Research and Development</i> sistem informasi berbasis AI						Dit. IKC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
	kecerdasan buatan, <i>Single Profile</i> , <i>Customer Relationship Management</i> dan lainnya	4.3.2.2	Peningkatan kualitas data untuk kesiapan pemanfaatan AI (<i>AI-Ready Data</i>)						Dit. IKC
		4.3.2.3	Peningkatan kualitas <i>data analytics</i> dan <i>business intelligence</i>						Dit. IKC
		4.3.2.4	Penyempurnaan CEISA 4.0 (<i>Single Core</i>)						Dit. IKC
		4.3.2.5	Pengembangan <i>Smart Customs</i> (Pemanfaatan AI) / <i>Trade AI</i>						Dit. IKC
		4.3.2.6	Pengembangan AI Penjaluran						Dit. IKC
		4.3.2.7	Penyiapan <i>dashboard</i> level manajerial untuk kendali pengawasan, pelayanan dan SPIT (<i>WAR Room</i>)						Dit. IKC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.3.2.8	Pembuatan <i>Dashboard Control Tower</i> : a. <i>Dashboard</i> monitoring hasil intelijen - penindakan – penyidikan b. <i>Dashboard</i> monitoring <i>intercept</i> c. <i>Dashboard</i> monitoring SPT-BKC HT d. <i>Dashboard</i> monitoring visitasi e. <i>Dashboard</i> monitoring pengaduan masyarakat khusus Rokok Ilegal f. <i>Dashboard</i> dan tindak lanjut monitoring penerimaan negara g. Tindak lanjut monitoring KI h. Pengembangan AI Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan i. Pengembangan AI Potensi Kebocoran Negara dari Kepabeanaan Cukai j. <i>Dashboard Intercept</i> dan <i>Counting Production</i> k. <i>Command Center</i> Satgas Nasional						Dit. IKC
		4.3.2.9	Pengembangan Profil Risiko yang valid dan <i>update</i>						Dit. PPS
		4.3.2.10	<i>Single Database</i> profil pengguna jasa kepabeanaan dan cukai						Dit. PPS
		4.3.2.11	Pengembangan EXAMS (Sistem Aplikasi <i>Data Analytic</i> di bidang Cukai berbasis <i>Artificial Intelegant</i> (AI)						Dit. TFC
		4.3.2.12	Pengembangan dashboard dan analisis AI untuk penguatan monitoring dan evaluasi pengawasan HT						Dit. TFC

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
4.3.3	Pemutakhiran tata kelola yang mendukung terwujudnya transformasi digital serta penguatan interoperabilitas ekosistem digital terintegrasi	4.3.3.1	Pemutakhiran SOP TIK						Dit. IKC
		4.3.3.2	Peningkatan kualitas standar interoperabilitas sistem dan data						Dit. IKC
		4.3.3.3	Penyusunan kebijakan dan prosedur tata kelola TIK DJBC						Dit. IKC
		4.3.3.4	Penerapan tata kelola data di lingkungan DJBC						Dit. IKC
		4.3.3.5	Interoperabilitas data melalui pengembangan Ekosistem Satu Data Kemenkeu						Dit. IKC
		4.3.3.6	Integrasi sistem pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN internal Kementerian Keuangan						Dit. Teknis
4.3.4	Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan <i>data security</i> , dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi	4.3.4.1	Peningkatan kualitas kewenangan hak akses dan pengamanan data di lingkungan DJBC						Dit. IKC
		4.3.4.2	Peningkatan kapabilitas perangkat <i>security</i>						Dit. IKC
		4.3.4.3	Pemeliharaan perangkat <i>security</i>						Dit. IKC
		4.3.4.4	Penyempurnaan sistem dan prosedur perlindungan data pribadi						Dit. IKC
4.3.5	Penguatan perlindungan hukum bagi institusi dan ASN	4.3.5.1	Penanganan perkara TUN, perdata, pidana, sengketa praperadilan, dan pemberian pendampingan terhadap pegawai						Dit. KBP

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.3.5.2	Penguatan perlindungan hukum pegawai						Dit. KBP
4.4 Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Publik									
4.4.1	Mewujudkan layanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi	4.4.1.1	Standarisasi layanan dan infrastruktur di pelabuhan/bandara						Dit. Teknis
		4.4.1.2	Pengelolaan aspek pelayanan publik di lingkungan DJBC						Setditjen
		4.4.1.3	Pelayanan perizinan <i>Corporate Guarantee</i>						Dit. PPS
4.4.2	Optimalisasi komunikasi publik dan bimbingan Pengguna Jasa	4.4.2.1	Strategi <i>branding</i> Organisasi DJBC						Dit. KBPJ
		4.4.2.2	Pelaksanaan Audit Komunikasi						Dit. KBPJ
		4.4.2.3	Pelaksanaan kampanye Anti Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai						Dit. KBPJ
		4.4.2.4	Pengelolaan citra melalui analisis media						Dit. KBPJ
		4.4.2.5	Penanganan isu sensitif / negatif						Dit. KBPJ
		4.4.2.6	Perencanaan komunikasi publik DJBC						Dit. KBPJ
		4.4.2.7	Monitoring dan evaluasi komunikasi publik dan bimbingan pengguna jasa						Dit. KBPJ
		4.4.2.8	Penyelenggaraan edukasi publik terkait kepabeanan dan cukai						Dit. KBPJ

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.4.2.9	Pameran kepabeanan dan cukai						Dit. KBPJ
		4.4.2.10	Dukungan sosialisasi, publikasi, serta <i>community</i> dan <i>media engagement</i>						Dit. KBPJ
		4.4.2.11	Optimalisasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) melalui <i>Marching Band</i>						Dit. KBPJ
		4.4.2.12	Peningkatan kualitas pengelolaan Museum Lokawistara dalam rangka menciptakan saluran publikasi Wisata Edukasi Kepabeanan dan Cukai						Dit. KBPJ
		4.4.2.13	Perumusan dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan peralatan pendukung kegiatan publikasi						Dit. KBPJ
		4.4.2.14	Produksi media publikasi cetak						Dit. KBPJ
		4.4.2.15	Pembuatan rumusan kebijakan tentang tugas dan fungsi bimbingan pengguna jasa						Dit. KBPJ
		4.4.2.16	Optimalisasi Manajemen Pusat Kontak Layanan						Dit. KBPJ
		4.4.2.17	Penyelenggaraan audiensi bersama <i>stakeholder</i>						Dit. KBPJ

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.4.2.18	Pengelolaan hubungan antar lembaga strategis DJBC						Dit. KBPJ
		4.4.2.19	Peningkatan kualitas layanan Pusat Kontak Layanan						Dit. KBPJ
		4.4.2.20	Sosialisasi/internalisasi peraturan dan Standar Pemberian Layanan Bimbingan Pengguna Jasa, baik ke internal maupun ke eksternal						Dit. KBPJ
		4.4.2.21	Penguatan dan pengembangan pengelolaan <i>Contact Center</i>						Dit. KBPJ
		4.4.2.22	Analisa terhadap <i>Database</i> Layanan Informasi DJBC						Dit. KBPJ
		4.4.2.23	Pelaksanaan asistensi SPLIT						Dit. KBPJ
		4.4.2.24	Pelaksanaan asistensi layanan informasi						Dit. KBPJ
		4.4.2.25	Peningkatan keandalan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai Keterbukaan Informasi Publik						Dit. KBPJ
		4.4.2.26	Penguatan strategi komunikasi dengan perumusan kebijakan Pedoman Pengelolaan Komunikasi						Dit. KBPJ
		4.4.2.27	Protokol terhadap kebijakan titipan dari K/L lain						Dit. KBPJ
		4.4.2.28	Sosialisasi program rekordasi kepada pemangku kepentingan						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program	2025	2026	2027	2028	2029	UIC
		4.4.2.29	Edukasi publik tentang ekstensifikasi cukai						Dit. TFC
		4.4.2.30	Sosialisasi pemberian fasilitas dan kemudahan pembayaran cukai						Dit. TFC
		4.4.2.31	Asistensi pengguna jasa dan unit vertikal DJBC terkait dengan kluster perizinan, produksi, penyelesaian, dan perdagangan						Dit. TFC
		4.4.2.32	Bimbingan teknis atas kebijakan kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai serta perdagangan bebas						Dit. KSIKC
		4.4.2.33	Sosialisasi pemberian fasilitas hulu migas dan/atau energi baru terbarukan						Dit. Fasilitas

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR PENERIMAAN DAN
PERENCANAAN STRATEGIS,



Ditandatangani secara elektronik
MOHAMMAD AFLAH FAROBI

